

# **EFEKTIVITAS PENERAPAN *SMART CARD* DALAM UJI KELAYAKAN KENDARAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG**

## ***EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF SMART CARD IN VEHICLE FEASIBILITY TEST AT THE CITY OF TRANSPORTATION OFFICE OF TANJUNGPINANG***

Adjie Hardyansyah<sup>1</sup>, Rumzi Samin<sup>2</sup>, Ramadhani Setiawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang, Indonesia

E-mail: [adjiehardyansyah@gmail.com](mailto:adjiehardyansyah@gmail.com)

**Abstrak:** Transportasi yang menjadi konsentrasi dari Seksi Pengujian kendaraan bermotor terhadap pemeriksaan kendaraan bermotor. Tujuan penelitian untuk mengetahui Efektivitas Penerapan *Smart Card* dalam Uji Kelayakan Kendaraan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang merujuk pada indikator Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sampel 11 informan yang merupakan pengguna kendaraan wajib KIR. Hasil penelitian berdasarkan indikator pencapaian tujuan *Smart Card* tersebut dikatakan tidak efektif dan waktu terhitung hingga sekarang belum dapat maksimal bahkan target retribusi turun karena tidak terpenuhi di tahun 2021 sebesar 350 jt menjadi 150 jt, kemudian integrasi yang dijalankan belum dapat melakukan sosialisasi dan razia gabungan sesuai dengan yang dilaksanakan kementerian perhubungan, hal tersebut juga berdampak pada banyaknya kendaraan yang tidak uji KIR, juga menganggap bahwa uji KIR tidak berlaku di Tanjungpinang, selanjutnya adaptasi dapat dikatakan sulit beradaptasi melihat program tersebut ada beberapa tahapan dan mengharuskan pengguna kendaraan memperbaiki kendaraannya di bengkel resmi yang memiliki alat pendukung dengan alat uji KIR. Kesimpulan penelitian dinilai belum efektif berdasarkan temuan penelitian mengenai jumlah kendaraan yang tidak melakukan KIR terhadap perubahan yang terjadi sehingga peningkatan PAD menjadi aspek penting dalam keberhasilan pemberlakuan program *Smart Card* tersebut.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Uji Kelayakan Kendaraan, Smart Card*

**Abstract:** *Transportation is the concentration of the Motor Vehicle Testing Section on motor vehicle inspections. The purpose of the study was to determine the effectiveness of the application of the Smart Card in the Vehicle Feasibility Test of the Tanjungpinang City Transportation Service referring to the indicators of Achievement of Goals, Integration, Adaptation. The study used qualitative research methods with a sample of 11 informants who were users of mandatory KIR vehicles. The results of the research based on the indicators for achieving the Smart Card goals are said to be ineffective and the time as of now has not been able to maximize the retribution target even decreased because it is not fulfilled in 2021 by 350 million to 150 million, then the integration that has been carried out has not been able to carry out socialization and joint raids in accordance with carried out by the ministry of transportation, this also has an impact on the number of vehicles that are not tested for KIR, also considers that the KIR test does not apply in Tanjungpinang, then adaptation can be said to be difficult to adapt because the program has several stages and requires vehicle users to repair their vehicles at official workshops that have supporting tools with KIR test equipment. The conclusion of the study was considered ineffective based on research findings regarding the number of vehicles that did not perform KIR on the changes that occurred so that the increase in PAD became an important aspect in the success of the implementation of the Smart Card program.*

**Keywords:** *Effectiveness, Vehicle Feasibility Test, Smart Card*



## PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 2 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan mengenai terjaminnya kebutuhan jasa transportasi dan dapat menyediakan prasarana dan sarana transportasi merupakan keharusan untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan transportasi yang efektif, efisien dan keamanan yang baik. Sistem transportasi yang bertambah lancar dan berkapasitas juga akan memunculkan masalah dalam keamanan dan keselamatan pengguna transportasi, hal lain juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pelaksanaan pengiriman barang, pariwisata, maupun pendidikan.

Menurut Jeklin (2016:1) pembangunan dalam jangka panjang diharapkan terus menyebar diseluruh penjuru tanah air dan berkurangnya angka kemiskinan menjadi keberhasilan pembangunan, itu semua tidak terlepas dari peran secara aktif sektor transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dimana kualitas pembangunan disektor transportasi diarahkan pada system transportasi nasional yang handal, tertib, lancar, nyaman, aman, dan efisien untuk menunjang dan menggerakkan pembangunan dengan mobilitas manusia, barang, jasa serta pola distribusi dalam menjalankan pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan didukung pada sektor transportasi.

Menurut Sulham (2017) Konsep pelayanan akan selalu berbeda pada kehidupan setiap manusia, penyelenggara pelayanan publik saat ini harus sesuai dengan paradigma pelayanan publik yang berkembang yakni *New Public Service*, paradigma ini memandang publik sebagai *citizen* atau warga negara yang memiliki hak dan kewajiban publik yang sama. Karena salah satu instrumen pembangunan yang

merupakan hak khusus yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat adalah layanan publik. Mahsun (2006:182) menjelaskan bahwa efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Ni Wayan (2007) Keterbukaan informasi jika dikaitkan dalam aktifitas pelayanan ini akan ikut mendorong kian sadar akan hak dan kewajibannya, terlepas dari pada itu penyelenggara pelayanan perlu menjalankan tanggungjawab negara dengan terbebasnya pelayanan dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output).

Duncan 1973 dalam Steers (1985:193) dalam penelitian efektivitas selalu ditentukan bahwa kemampuan organisasi menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah secara berhasil merupakan ciri utama organisasi yang efektif. Duncan 1973 dalam Steers (1985:53) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut :

### 1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan upaya organisasi dalam pencapaian tujuan harus dipandang sebagai bentuk suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam segi pentahapan pencapaian bagian-bagiannya ataupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

### 2. Integrasi

Yaitu penyesuaian terhadap sebuah proses yang majemuk dari unsur-unsur yang berbeda melalui pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi dan pengembangan konsensus di tengah masyarakat. Integrasi menyangkut proses sosialisasi dilapangan.

### 3. Adaptasi

Adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan keadaan di lapangan.

Pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang pada tahun berjalan sudah banyak mengalami perubahan dari sebelumnya, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sesuai dengan misi dari Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, sehingga dalam pencapaian tujuan yang efektif agar dapat memperoleh suatu hasil yang semaksimal mungkin, upaya mengevaluasi dilakukan melalui konsep efektivitas yang menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perubahan teknis sebelumnya dilakukan secara manual tanpa alat bantu system, pemberlakuan terbaru segala bentuk pengecekan teknis sudah mulai menggunakan system dengan ketentuan yang sudah ditetapkan didalamnya sehingga minim terhindar dari kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pengecekan manual.

Pengujian kelaikan kendaraan atau disebut juga uji KIR dimaksudkan untuk mengecek kelayakan dan kondisi kendaraan sesuai dengan standar keamanan penumpang serta aturan yang berlaku, kegiatan ini dilakukan untuk menguji dan

memeriksa bagian-bagian kendaraan dalam pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan untuk jangka waktu pelaksanaan berkala dilakukan setiap 6 bulan sekali, dishub juga memberikan denda administratif jika memiliki keterlambatan untuk uji KIR selanjutnya sebesar 2% perbulan dari tarif kendaraan tersebut.

Perubahan teknis sebelumnya dilakukan secara manual tanpa alat bantu system, pemberlakuan terbaru segala bentuk pengecekan teknis sudah mulai menggunakan system dengan ketentuan yang sudah ditetapkan didalamnya sehingga minim terhindar dari kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pengecekan manual.

Persyaratan kendaraan wajib KIR juga wajib untuk kendaraan bak terbuka termasuk *double cabin* pelat hitam yang digunakan mobil pribadi terkecuali kendaraan pribadi yang mengangkut penumpang umum seperti taksi online dikarenakan kendaraan pribadi yang diperuntukan usaha taksi online hanya perlu menerbitkan izin usaha kendaraan yang dikeluarkan dari perusahaan taksi online tersebut yang sudah mendaftarkan ke Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengeluarkan izin operasional kendaraan yang didaftarkan tersebut. Izin akan berlaku selama lima tahun. Dalam proses pendaftaran kendaraan tersebut terdapat beberapa syarat administrasi yang diberikan untuk mendapatkan stiker khusus kendaraan untuk taksi online.

**Table 1.1 Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Perda Nomor 2 Tahun 2021)**

Jenis Kendaraan	Tarif
-----------------	-------

Mobil penumpang umum termasuk taksi online	Rp. 55.000,-
Mobil bus dengan 9-28 tempat duduk	Rp. 60.000,-
Mobil bus dengan 29-40 tempat duduk	Rp. 70.000,-
Mobil barang JBB < 10.000 kg: pick up, pick up box, truck, truck box/tangki, light truck, truck molen	Rp. 60.000,-
Mobil barang JBB > 10.000 kg: dump truck, dump truck box/tangki, head tractor.	Rp. 70.000,-
Kereta gandeng dan kereta tempelan	Rp. 65.000,-
Kendaraan khusus : ambulans, mobil derek, kendaraan penyandang cacat	Rp. 70.000,-
Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp. 55.000,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, 2022

Dishub Kota Tanjungpinang ialah sebuah badan yang bertugas menjalankan urusan pemerintah daerah yang didasari asas otonomi daerah yang berfokus membantu pelaksanaan bidang perhubungan sekaligus ditugaskan untuk penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah salah satu pelayanan bagi masyarakat dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang adalah inovasi pelayanan uji kelayakan kendaraan dengan menggunakan *Smart Card* yang dijalankan pada Februari 2021 setelah disahkannya perubahan Nomor KP-DRJD 3291 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Uji KIR.

Tingkat keamanan dari *Smart Card* ini sangatlah aman dan tidak bisa dipalsukan berbeda dengan buku KIR sebelumnya, dan dari segi ukuran *smart card* tersebut sangat mudah untuk disimpan dan digunakan karena berbentuk seperti kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sistem *Smart Card* tersebut hanya ada pada wilayah Batam dan Tanjungpinang untuk wilayah Kepri.

Pemilik kendaraan yang sudah melakukan pengujian dan lulus uji dan sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub), akan disahkan oleh petugas lalu diberi tanda lulus uji, dan mendapatkan *Smart Card*. Kartu inilah yang menjadi pengganti dari program sebelumnya yang menggunakan buku KIR dengan diberlakukannya perubahan tersebut maka DISHUB Tanjungpinang berharap dapat

meningkatkan efisiensi kerja dari sabagai pendataan kendaraan yang sudah melakukan uji KIR.

Gambar 1.1 Contoh *Smart Card*



Dalam pelaksanaan uji KIR sejak dua tahun sebelum di sahkannya perda mengenai *Smart Card* tersebut dinas perhubungan tidak menjalankan UJI KIR dikarenakan dishub belum memiliki alat uji yang sesuai dengan standart pengujian kendaraan, maka dalam 2018-2020, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya dishub hanya melakukan pengujian tanpa menggunakan alat dan ini dinilai banyak kendaraan yang melakukan uji KIR karena angka kelulusan UJI KIR sangat tinggi dan kerusakan kendaraan dapat terima tanpa adanya ketentuan khusus dari kementerian.

Hadirnya *Smart Card* tersebut diharapkan dapat mendorong Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tercatat hingga tahun 2022 dari target awal tahun 2021 lalu dimana target Rp 350 jt yang tercapai hanya Rp 32 jt atau hanya

11%, belakangan dari ratusan jumlah angkot yang masih beroperasi hanya terdapat 11 angkot saja yang rutin untuk melakukan uji KIR dan sudah lulus uji di tahun 2021 serta Taxi yang ada di Kota Tanjungpinang

belum melakukan uji KIR. selain tidak adanya kesadaran pemilik kendaraan, Dishub Kota Tanjungpinang juga tidak memiliki anggaran untuk melakukan razia penertiban kendaraan. (Ilham, 2022).

**Table 1.2 Data Pelaksanaan Uji Berkala Tahun 2021-2022**

URAIAN	M. PENUMPANG		M. BIS		M. BARANG		KENDARAAN KHUSUS		KRT. GANDENGAN		KRT. TEMPELAN		JUMLAH		
	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U+BU
KENDARAAN YANG UJI	-	-	12	6	39	323	50	17	-	-	-	1	101	347	448
KENDARAAN YANG LULUS UJI	-	-	12	5	39	289	50	17	-	-	-	1	101	312	413
KENDARAAN YANG TIDAK LULUS UJI	-	-	-	1	-	34	-	-	-	-	-	1	-	35	35

URAIAN	M. PENUMPANG		M. BIS		M. BARANG		KENDARAAN KHUSUS		KRT. GANDENGAN		KRT. TEMPELAN		JUMLAH		
	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U+BU
2019	12	-	90	63	1048	3116	12	76	-	-	-	1	1150	3267	4417
2020	12	-	90	65	1049	3153	12	76	-	-	-	1	1151	3306	4457
2021	12	-	90	73	1050	3224	12	58	-	-	-	1	1152	3367	4519

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, 2022

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 dari jumlah kendaraan yang wajib uji KIR sebanyak 4.519 kendaraan dan dari jumlah kendaraan hanya 448 kendaraan yang melakukan uji KIR, kemudian kendaraan yang lulus uji pada tahun 2021 hanya 413 kendaraan dari jumlah tersebut yang dapat dikatakan lulus uji dan sudah mendapatkan *Smart Card*. Disinilah aspek media relations juga sangat dibutuhkan. Pemberitaan yang dimuat di media masa cenderung kepada kelebihan dari *smart card* sendiri, tapi fenomenanya belum begitu pesat terkait tentang berbagai jenis

sosialisasi yang telah dilakukan pihak Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang kepada masyarakat.

Penulis menganggap topik ini menarik untuk diteliti dengan melihat efektivitas dalam berjalannya program tersebut dengan melihat berdasarkan teori Duncan 1973 dalam Steers (1985:193) terdapat 3 indikator dalam efektivitas. Diantaranya Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi, Berdasarkan beberapa indikator efektivitas yang diungkapkan menurut beberapa ahli diatas, bahwa teori yang cocok digunakan dalam penelitian ini

adalah indikator efektivitas menurut Duncan 1973.

## **METODE**

Jenis dan lokasi penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada rumusan masalah penelitian.

Penelitian kualitatif menurut albi anggiato (2018:7) merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, sedangkan menurut Kirk & Miller (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Penelitian ini dilakukan pada pengguna kendaraan yang wajib uji KIR dan belum melakukan uji KIR. Lokasi penelitian ini di Dishub Kota Tanjungpinang. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan pengelolaan uji teknis dan pendataan kendaraan merupakan hal yang penting untuk keselamatan dan keamanan pengemudi atau penumpang.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan wawancara langsung kepada narasumber dengan acuan pedoman wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari orang lain atau lewat dokumen, peneliti menggunakan jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan penelitian serta berita online yang terkait yang dijadikan sebagai sumber sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara karena melihat pada proses mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya sehingga bisa melihat pengaruh penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2017:137) terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu, kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument penelitian berkenan dengan validitas dan reliabilitas instrument, dan kualitas pengumpulan data berkenan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Pengguna kendaraan yang melakukan uji KIR, Pengguna kendaraan yang lulus uji KIR dan Pengguna kendaraan yang gagal dalam uji KIR.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Administrasi profil wilayah status Kota Tanjungpinang adalah kota administratif dari Kabupaten Kepulauan Riau. Kota ini memiliki kawasan yang strategis dan terletak di segitiga SIJORI (Singapura, Johor, dan Riau). Secara geografis wilayah Kota Tanjungpinang terletak antara 0° 51' 30" - 0° 59' 8" Lintang Utara dan 104° 24' - 104° 34' Bujur Timur dengan luas wilayah 239,5 km<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- 1) Batas Utara : Kabupaten Kepulauan Riau
- 2) Batas Selatan : Kabupaten Kepulauan Riau, dan Batam
- 3) Batas Timur : Kabupaten Kepulauan Riau
- 4) Batas Barat : Kabupaten Kepulauan Riau, dan Batam

Kepulauan Riau dengan didukung potensi alam yang sangat potensial, sangat berkemungkinan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan. Terlebih lagi saat

ini pada beberapa daerah di Provinsi ini tengah diupayakan sebagai pilot project pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui kerjasama dengan Pemerintah Singapura. Tanjungpinang menjadi Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau pada awal kemerdekaan, adapun secara Administratif Ibukota Provinsi ini terletak di Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang adalah ibukota Kabupaten Kepulauan Riau, terletak di Pulau Bintan. Perdagangan menjadi suatu kebutuhan mengingat tanah kota yang dikenal dengan kota bestari ini berjenis podsolik merah kuning yaitu tanah masam dengan tekstur pasir berlempung.

Kota Tanjungpinang memiliki sembilan buah pulau, dimana 4 pulau merupakan pulau berpenghuni sedangkan 5 pulau lainnya adalah pulau kosong.



Gambar 1. Peta Kota Tanjungpinang

Dari 4 kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi 18 Kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang. Adapun persentase pembagian luas kecamatan di daerah di Kota Tanjungpinang: Kecamatan Bukit Bestar seluas 46,51 km<sup>2</sup> merupakan 31% dari luas keseluruhan Kota Tanjungpinang, Kecamatan Tanjungpinang Timur seluas 60,04 km<sup>2</sup> merupakan 40% dari total luas, kemudian Kecamatan Tanjungpinang Kota seluas 39,69 km<sup>2</sup> yang merupakan 26% dari luas keseluruhan dan Tanjungpinang barat seluar 4,62 km<sup>2</sup> yang hanya bagian dari 3% dari luas keseluruhan.

Pada prinsipnya dinas perhubungan Kota Tanjungpinang merupakan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Urusan Perhubungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi masalah Transportasi yang menjadi konsentrasi dari urusan Perhubungan yang ada di Kota Tanjungpinang, dalam menjalankan tugasnya terdapat perangkat perangkat yang di susun untuk membantu rencana kerja dari Dishub yang berdasarkan hasil SOPT tahun sebelumnya yaitu Seksi Pengujian kendaraan bermotor adalah salah satu seksi pada Dinas Perhubungan yang berkonsentrasi terhadap pemeriksaan/pengujian kendaraan bermotor.

Menurut Hidayat 1986 dalam Kasmanto Rinaldi (2021:10) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input, menurut definisi dari pendapat ahli diatas indikator efektivitas berarti bahwa sudut pandang pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan bahwa konsep efektivitas merupakan konsep multidimensi, artinya ketika mendefinisikan efektivitas, sekalipun tujuan akhir efektivitas tetap sama yaitu pencapaian tujuan, maka akhirnya akan berbeda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki.

Presiden telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 03 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, inpres tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam menunjang perannya sebagai pelayanan masyarakat, kini berbagai negara menekankan pada birokrasi berbasis teknologi informasi sebagai salah satu



solusi efektivitas birokrasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang di atur oleh perundangan-undangan, *Smart Card* menjadi salah satu bentuk dari kemajuan teknologi di tingkat pelayanan dari di hub kota tanjungpinang, program ini di dorong untuk mempermudah pendataan kendaraan yang sudah uji KIR.

Berdasarkan teori Duncan 1973 dalam Steers (1985:193) dalam penelitian efektivitas selalu ditentukan bahwa kemampuan organisasi menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah secara berhasil merupakan ciri utama organisasi yang efektif.

#### 1. Pencapaian Tujuan Dari Program *Smart Card* di Kota Tanjungpinang

Dapat disimpulkan terkait Aspek Pencapaian Tujuan dengan apa yang diuraikan yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa *Smart Card* dari segi efisiensi kerja kartu tersebut terbilang lebih efisien dibandingkan dengan sebelumnya namun dalam upaya peningkatan jumlah kendaraan untuk uji KIR sebagai salah satu *income* yang dapat diterima oleh dishub dalam melakukan pendataan dishub belum dapat dikatakan efektif dengan tidak adanya peningkatan pengguna kendaraan yang melakukan uji KIR sejak tahun 2021.

Dengan begitu banyak pengguna kendaraan terkait dengan penggunaan *Smart Card* ini terlihat masih kurangnya pemahaman dalam penggunaan dengan sistem barcode tersebut serta memberatkan pengguna kendaraan terhadap alat uji teknis yang terbaru.

Berdasarkan hasil Pencapaian tujuan yang digunakan terlihat masih kurang Efektifnya pencapaian tujuan dalam Program *Smart Card* jika melihat keseluruhan mulai dari segi waktu sejak tahun 2021 *Smart Card* di resmikan di kota Tanjungpinang namun belum dapat mempengaruhi PAD hal tersebut terlihat dengan minimnya pengguna kendaraan yang tidak melakukan uji KIR didasari dengan semakin ketatnya teknis pengujian

kemudian pengguna kendaraan kurang mengetahui tentang bagaimana akses data kendaraan dan apa saja kegunaannya yang bisa digunakan dari kartu tersebut.

Maka pencapaian tujuan dari *Smart Card* tersebut dapat dikatakan tidak efektif dengan melihat berdasarkan pengaruh PAD dan minimnya angka kendaraan yang uji KIR, karena pengaruh pengguna kendaraan dari 2021 menentukan terhadap banyaknya kendaraan yang menggunakan *Smart Card* maka hal tersebut yang menjadi pengaruh yang sangat simultan terhadap proses pendataan yang diberikan terhadap manfaat dari adanya *Smart Card* tersebut.

#### 2. Integrasi Dari Program *Smart Card* di Kota Tanjungpinang

Terkait dengan aspek Integrasi yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa pihak yang berwenang dalam memberikan sosialisasi yaitu Dinas Perhubungan bersama dengan mitra kepolisian, berjalan sejak diresmikannya *Smart Card* tersebut dishub belum pernah melakukan sosialisasi, kemudian melihat dari segi pemahaman serta perubahan yang terjadi terhadap alat uji KIR, sebagaimana yang terjadi di lapangan dan dari sebagian pengguna kendaraan yang sudah memegang kartu *Smart Card* banyak yang tidak mengetahui tentang bagaimana akses kendaraan yang menjadi keunggulan dari kartu tersebut serta banyak pengguna kendaraan yang tidak melakukan uji KIR dengan melihat dari segi sosialisasi pemahaman akan kartu tersebut serta sosialisasi proses pelaksanaan pengujian yang tidak diterima oleh pengguna kendaraan.

Integrasi dari segi sosialisasi program *Smart Card* hal ini juga terlihat dari penyampaian sosialisasi yang tidak didapatkan, sehingga banyak pengguna kendaraan yang tidak mengetahui terhadap perubahan yang terjadi. Tentunya hal ini menjadi perhatian serius bagi pihak dishub untuk memaksimalkan sosialisasi dengan memanfaatkan pos pos dishub yang tersebar di kota Tanjungpinang.

### 3. Adaptasi Dari Program *Smart Card* di Kota Tanjungpinang

Terkait dengan aspek Adaptasi yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa program *Smart Card* secara umum belum dapat beradaptasi dan belum dapat menyesuaikan dengan keadaan pengguna kendaraan khususnya pengguna kendaraan yang belum melakukan uji KIR dikarenakan kehadiran program ini bermuara dengan proses pendataan kendaraan namun didalamnya terdapat berbagai update alat uji KIR yang menjadi kendala banyak kendaraan yang merasa keberatan dalam melakukan uji KIR. Berdasarkan hasil Adptasi yang di uraikan diatas tentang program *Smart Card* dan sebagaimana yang terjadi dilapangan dari segi penggunaan *Smart Card* banyak dari pengguna kendaraan menganggap bahwa kartu tersebut hanya sebagai bukti lulus uji.

Selanjutnya terkait hasil Adaptasi terlihat bahwa masih kurang efektifnya manfaat dari program *Smart Card* tersebut, dapat dilihat dari respon pengguna kendaraan yang tidak mengetahui cara melihat data kendaraan mereka, kemudian dari segi alat uji KIR pihak dishub menganggap bahwa alat uji masih banyak mengalami kerusakan bahkan alat uji yang digunakan dishub kota tanjungpinang terbilang alat uji yang model lama, sedangkan hal tersebut pengguna kendaraan merasa alat uji yang ada pada dishub sudah cukup sempurna, bahkan dengan pembaruan alat uji tersebut menjadi salah satu faktor keberatan dari pengguna kendaraan dalam melakukan uji KIR yang merasa bahwa terlalu memberatkan pengguna kendaraan dengan tanpa adanya keringanan bahkan kemudahan dalam pengujian sehingga pendataan kendaraan dengan *Smart Card* tidak dapat di maksimalkan.

Perlu adanya perhatian konsisiten dari pihak pemerintah atau dinas perhubungan dalam penggunaan dan pemanfaatan serta penyesuaian agar lebih efektif dan dapat memberikan kemudahan

bagi pengguna kendaraan untuk dapat melakukan uji KIR sehingga program tersebut dapat dijalankan efektif dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang uji KIR. Sesuai dengan visi dan misi dari bagian pengujian kendaraan bermotor.

## SIMPULAN

Kesimpulan bahwa efektivitas penerapan *Smart Card* di kota tanjungpinang yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan melihat ukuran dari respon pengguna kendaraan yang sudah melaksanakan uji KIR, yang akan melaksanakan uji KIR, maupun yang belum melaksanakan uji KIR, serta target yang diberikan dengan hasil yang tercapai belum maksimal, adapun kesimpulan perdimensi yang ditinjau dari beberapa aspek :

1. Pencapaian Tujuan, diketahui bahwa *Smart Card* dari segi peningkatan efisiensi kerja dengan visi misi dari dishub untuk merekap data kendaraan sebagai bentuk kemudahan bagi dishub, sehingga *Smart Card* tersebut juga dapat memberikan kemudahan bagi pengguna kendarana dalam melihat data kendaraan milik mereka yang sudah dikatakan lulus uji. Berkaitan dengan hal tersebut maka pendataan dapat akan dilakukan ketika kendaraan sudah lulus dalam uji KIR, maka pengguna kendaraan yang melakukan uji KIR menjadi faktor utama dalam berjalanya program tersebut, kemudian dari waktu terhitung sejak tahun 2021 dishub melakukan uji KIR dengan menerapkan *Smart Card* hingga saat ini belum dapat memaksimalkan target PAD, hal tersebut menjadi tolak ukur bahwa dalam pencapaian tujuan *Smart Card* tersebut dikatakan tidak efektif dan waktu terhitung hingga sekarang belum dapat maksimal bahkan target retribusi turun karena tidak terpenuhi di tahun 2021 yaitu hanya 150 jt dari mulanya 350 jt.

2. Integrasi yang diukur melalui proses penyesuaian terhadap unsur unsur yang berbeda melalui pihak yang berwenang dalam memberikan sosialisasi, sejak tahun 2021 setelah diberlakukannya *Smart Card* di kota Tanjungpinang dishub belum dapat

melakukan sosialisasi dan razia gabungan sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh kementerian perhubungan, hal tersebut juga berdampak pada banyaknya kendaraan yang tidak melakukan uji KIR, juga pengguna kendaraan menganggap bahwa uji KIR tidak lagi berlaku di Tanjungpinang, terlebih pengguna kendaraan mengeluh soal tidak adanya pemberitahuan terhadap sanksi administratif. Kemudian pengetahuan pengguna kendaraan terhadap cara akses data kendaraan mereka, dan hal lain yang dirasa akan mengalami perubahan dikemudian hari, maka dengan pertimbangan tersebut sosialisasi yang diberikan dinilai kurang efektif.

3. Adaptasi, program Smart Card secara umum dapat dikatakan bahwa program tersebut sulit beradaptasi dengan melihat respon penggunaan kendaraan yang merasa bahwa dengan adanya program tersebut terdapat kesulitan dalam uji KIR sehingga mengharuskan pengguna kendaraan untuk wajib memperbaiki kendaraannya di bengkel resmi yang memiliki alat mendukung dengan alat uji KIR. Terlebih dishub tidak dapat memberikan kemudahan dan diberatkan oleh sanksi administratif dengan sebab dari akibat tidak adanya sosialisasi sejak tahun 2020, karena belum sepenuhnya maksimal maka bentuk adaptasi dari program tersebut dinilai kurang efektif.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenalkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Fitri Kurnianingsih S.Sos.,M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberi masukan selama perkuliahan.
2. Bapak Dr. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang membantu dalam penyusunan skripsi saya.

3. Bapak Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang membantu dalam penyusunan skripsi saya.
4. Bapak H. Alfizar, S.Sos selaku KASI Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang serta Staff yang telah memberi izin dalam penelitian saya

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Abadi, Muh Yusri (2021). Efektivitas Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Pekerja Sektor Informal. Uwias Inspirasi Indonesia.
- Asrizal Andi (2022), Efektivitas Pelayanan Akte Kelahiran Dan Kendala Yang Di Hadapi. CV. Mitra Cendekia Media. 21-22
- Atmosoeparto, Krisdarto, 2002. Menuju SDM Berdaya- Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien, PT. Elex Media Komputindo.
- Daniel Setiawan (2022). Determinan Efektivitas Kemampuan Militer. CV. Adanu Abimata. 19-20
- Kasmonto Renaldi (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. Kota Batam, 10-12
- Steers. (1984). Efektivitas Organisasi (2nd ed.). Erlangga.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. ALFABETA.
- (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . ALFABETA.

**Artikel jurnal**

- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti". Denpasar: Jurnal Ekonomi dan Sosial Input. Volume 2 No.1.
- Jeklin, A. (2016). Efektivitas Pengujian Layak Jalan Kendaraan Mini Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar. July, 1–23
- Lestanata, Yudhi. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015. Yogyakarta. Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Maeyasari, E. (2012). Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Darah Kabupaten Lebak. In Eprints Untirta
- Melati, 2015 Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo, Makassar. Universitas Hasanuddin
- Paulo. ( 2019). Efektifitas Pelayanan Registrasi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar. Universitas Muhammadiyah Makassar, 1–9
- Setyawati S. 2018 Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Bagi Siswa Smk di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar): Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri.
- Wayne, A. M. (2020). Efektivitas Penerapan E-Tilang Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(January), 57–120.